



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

#2023
#KHP THRIVE



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR
PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

TAHUN ANGGARAN 2023



... KATA PENGANTAR ...

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Perencanaan kinerja merupakan penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategic, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrument untuk pengukuran capaian kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, diperlukan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) BRPBAP-PP Tahun 2023. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.

Maros, 30 Januari 2023

Pt. Kepala Balai



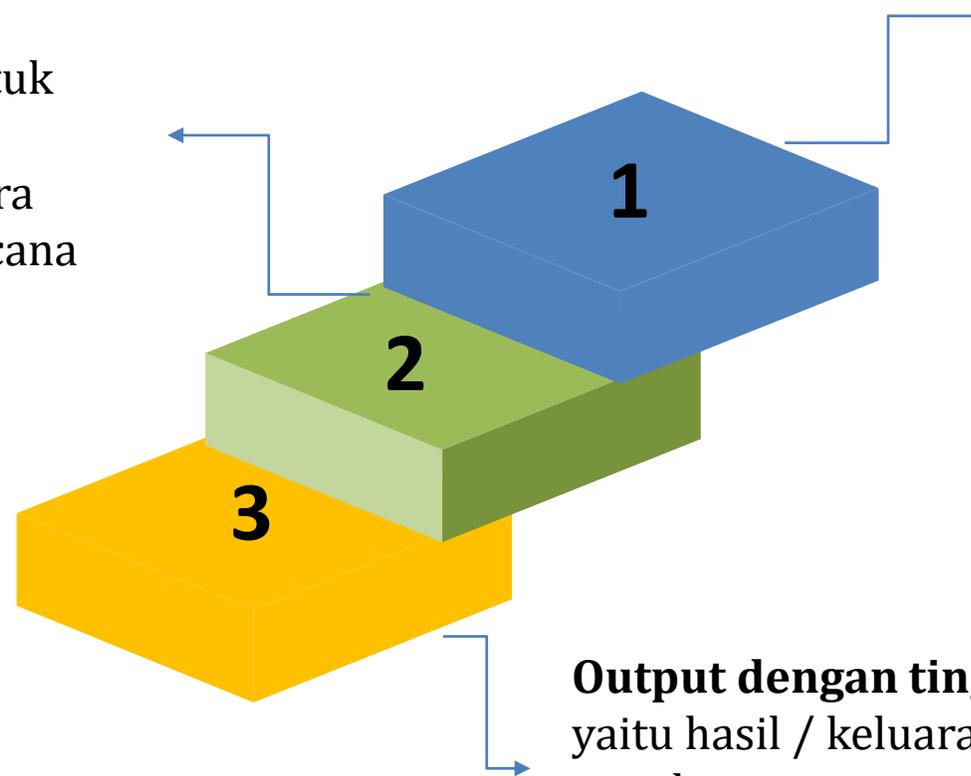
A. Indra Jaya Asaad

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Tingkat Validitas Indikator Kinerja	iii
Indikator Kinerja Kegiatan BRPBAP-PP TA.2023	
1. Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBAP-PP (Kelompok)	1
2. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPBAP-PP (Kelompok)	4
3. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBAP-PP (Kelompok)	7
4. Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup Penyuluhan KP BRPBAP-PP (orang)	10
5. Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (kelompok)	13
6. Nilai PNPB BRPBAP-PP (Rupiah Miliar)	15
7. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BRPBAP-PP Dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBAP-PP TA 2022 (%)	18
8. Indeks Profesionalitas ASN BRPBAP-PP (Indeks)	21
9. Nilai PM SAKIP BRPBAP-PP (Nilai)	26
10. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBAP-PP (Nilai)	30
11. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBAP-PP (%)	34
12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BRPBAP-PP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	38
13. Nilai IKPA BRPBAP-PP (Nilai)	41
14. Nilai Kinerja Anggaran BRPBAP-PP (Nilai)	47
15. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBAP-PP (Kemitraan)	51
16. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPBAP-PP (%)	54
17. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Penyuluhan KP BRPBAP-PP (%)	58

Tingkat Validitas Indikator Kinerja

Output dengan tingkat kendali rendah,
yaitu hasil / keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh selain pemilik rencana Kinerja;



Outcome,
yaitu hasil/ manfaat/ dampak yang diharapkan dalam jangka pendek, menengah atau panjang;

Output dengan tingkat kendali tinggi,
yaitu hasil / keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik rencana Kinerja.

1

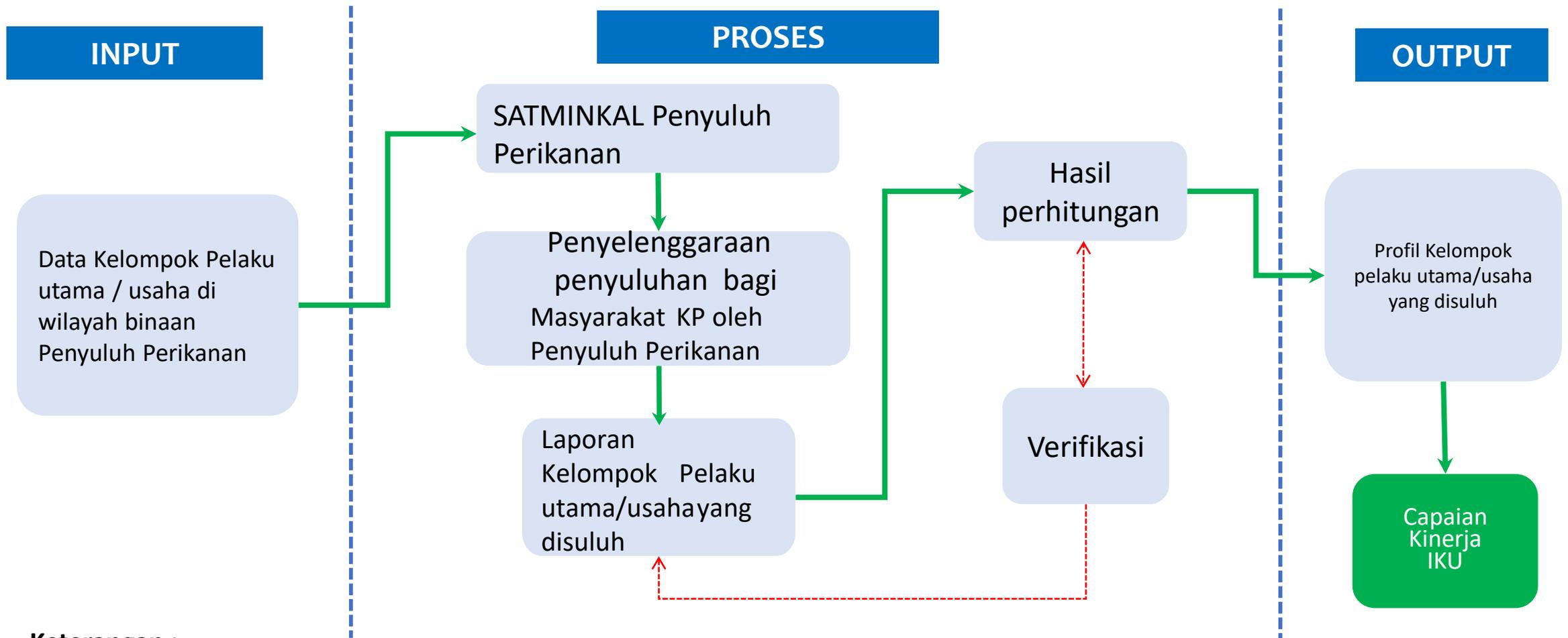


Indikator Kinerja :

**Jumlah Kelompok Pelaku Utama/
Pelaku Usaha yang disuluh di
Satminkal BRPBAP-PP (Kelompok)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBAP-PP (Kelompok)		
2	Definisi	:	<p>Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya.</p> <p>Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Kepala BRSDM Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan.</p> <p>CONTOH Kode Registrasi Kelompok : 2.1.12.05.0109.0214</p> <p>2 : kelompok kelas madya (Menjelaskan Kelas Kelompok) 1 : POKDAKAN (Menjelaskan Jenis Usaha Kelompok) 12 : Provinsi Jawa Barat (Provinsi) 5 : Kabupaten Sumedang (d disesuaikan dengan kodefikasi pada masing- masing wilayah) 0109 : bulan dan tahun terbentuk 0214 : bulan dan tahun dikukuhkan</p>		
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh yang disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil		
4	Satuan	:	Kelompok		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Satminkal Penyuluhan KP		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan
				<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
					<input type="checkbox"/> Tahunan
11	Bukti Dukung	:	1. Data Kelompok Masyarakat KP yang telah disuluh oleh penyuluh perikanan yang disahkan oleh Kepala Puslatluh KP, dilengkapi dengan link data dukung profil kelompok yang dilengkapi lampiran SK Penumbuhan dan atau Piagam Peningkatan Kelas Kelompok; 2. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan		

Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBAP-PP (Kelompok)



Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

2

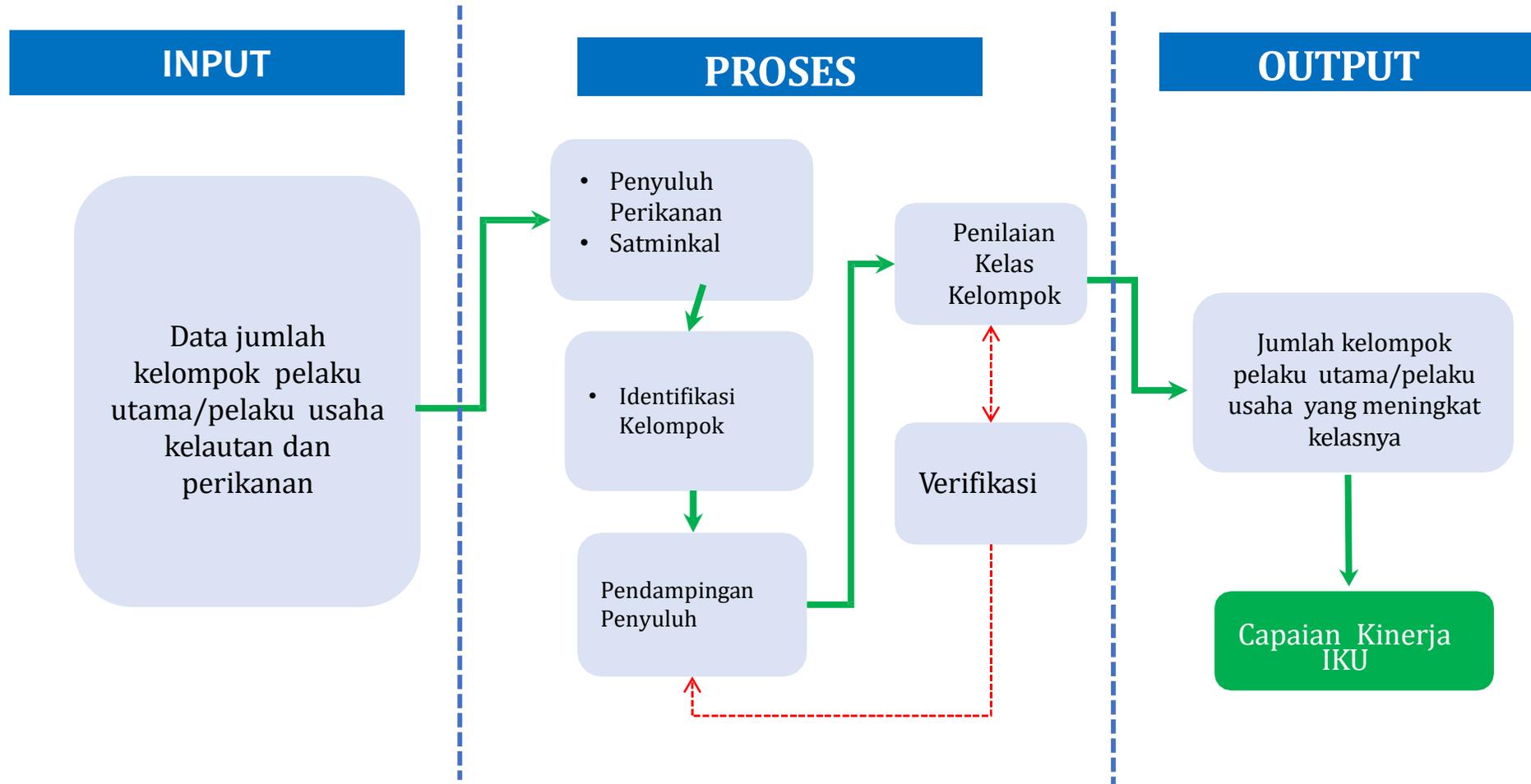


Indikator Kinerja :

**Kelompok Kelautan dan Perikanan
yang ditingkatkan kelasnya di
Satminkal BRPBAP-PP (Kelompok)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBAP-PP (Kelompok)		
2	Definisi	:	<p>Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas nya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men no 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, bupati/walikota dan atau Kepala Dinas perikanan setempat sesuai dengan kreteria kelompok yang dikukuhkan, dan /atau;</p> <p>Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.</p>		
3	Formula Perhitungan	:	Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya dan memenuhi kreteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan		
4	Satuan	:	Kelompok		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Satminkal Penyuluhan KP		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
11	Bukti Dukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang meningkat kelasnya (ditambahkan kolom yang berisi register sertifikat pengukuhan dan berita acara hasil penilaian), dan data kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang didampingi dan dinilai kelasnya dan dalam proses penetapan, beserta nama penyuluh perikanan Pembina 2. Dokumen penyampaian data dari Eselon III kepada Kepala BRSDM 3. Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker 		

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPBAP-PP (Kelompok)



Keterangan :

-  Proses
-  Validasi & Koreksi

3

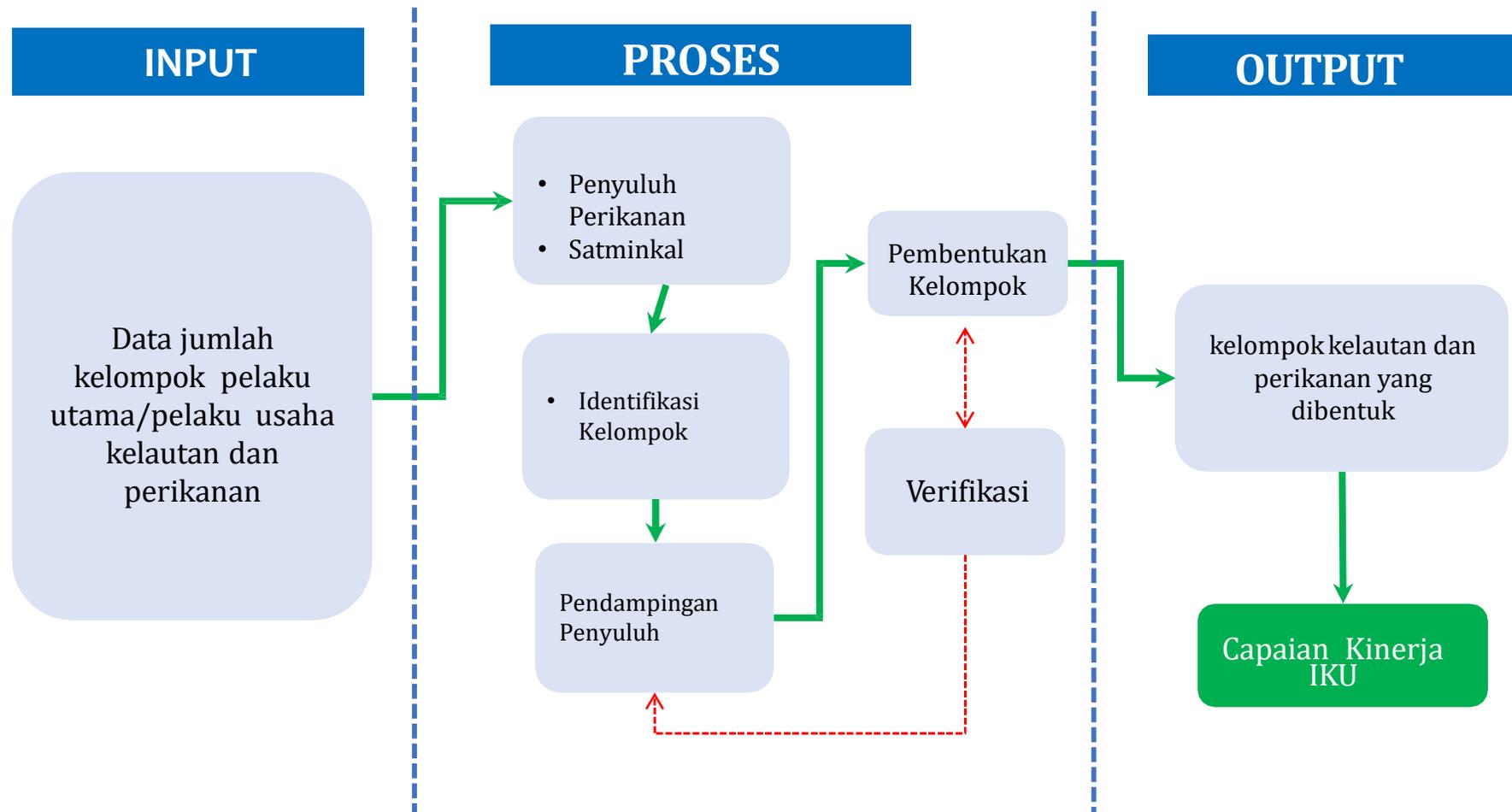


Indikator Kinerja :

**Kelompok Kelautan dan Perikanan
yang dibentuk di Satminkal
BRPBAP-PP (Kelompok)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPBAP-PP (Kelompok)		
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.		
3	Formula Perhitungan	:	Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan		
4	Satuan	:	kelompok		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Satminkal Penyuluhan KP		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan
					<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk
					<input type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
					<input type="checkbox"/> Tahunan
11	Bukti Dukung	:	<ul style="list-style-type: none"> Data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dibentuk (ditambahkan kolom yang berisi Berita Acara Pembentukan/ berisi register sertifikat pengukuhan dan nilainya) beserta nama penyuluh perikanan pembina Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BRSDM Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker 		

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPBAP-PP (Kelompok)



Keterangan :

- Proses
- - - → Validasi & Koreksi

4

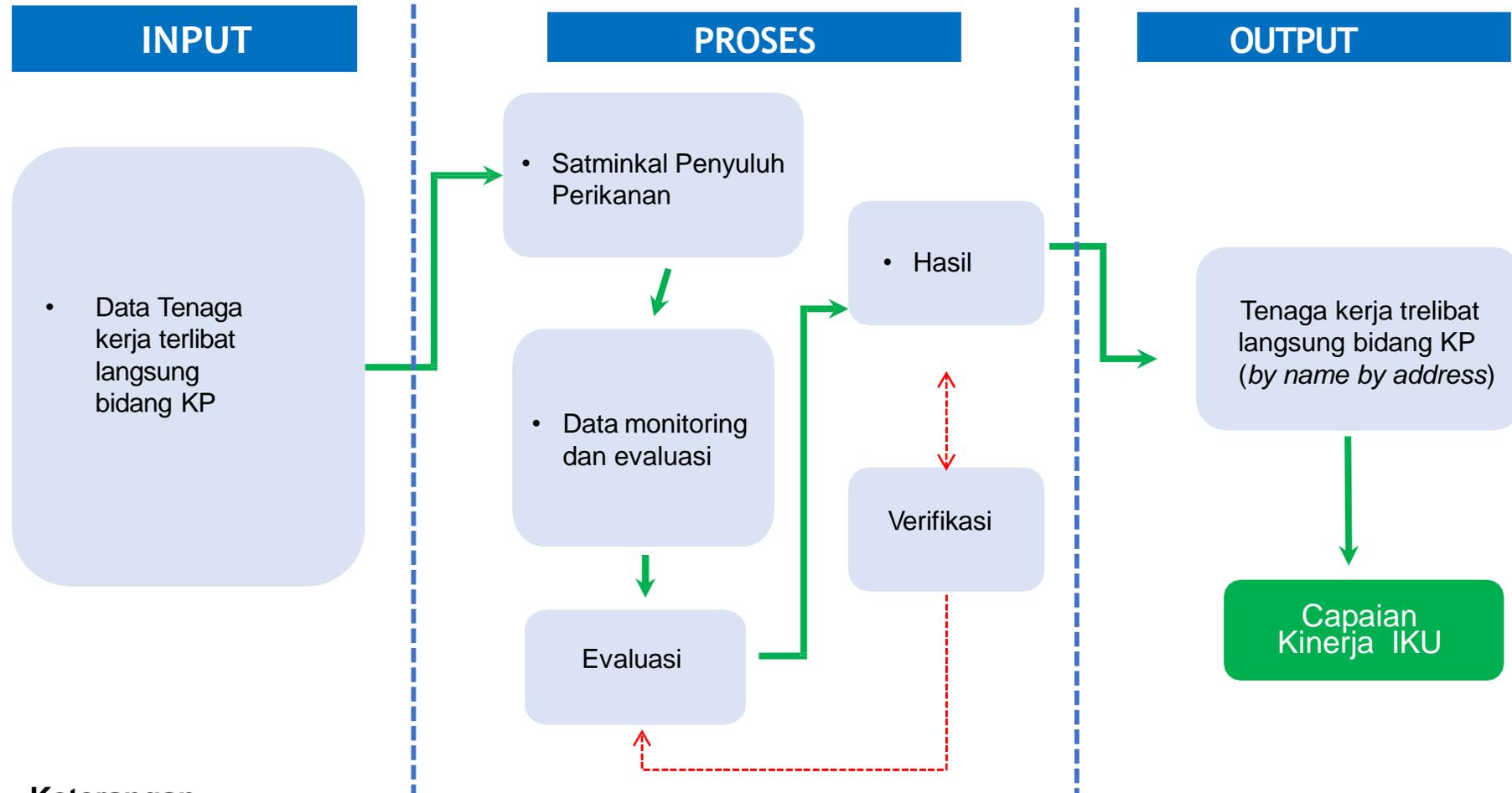


Indikator Kinerja :

**Tenaga Kerja yang terlibat lingkup
Penyuluhan KP BRPBAP-PP (orang)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
1	Nama Indikator	:	Tenaga Kerja yang terlibat lingkup Penyuluhan KP BRPBAP-PP (orang)				
2	Definisi	:	<p>Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan.</p> <p>Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup BRSDM diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu dan Penyuluh Swadaya, serta Tenaga kerja yang terlibat pada UMKM yang disuluh dan P2MKP</p>				
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah tenaga kerja yang terlibat lingkup Puslatluh KP				
4	Satuan	:	orang				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Satminkal Penyuluhan KP				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	Data tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung by name by address yang disahkan pimpinan				

Tenaga Kerja yang terlibat lingkup Penyuluhan KP BRPBAP-PP (orang)



Keterangan :

- Proses
- - - → Validasi & Koreksi

5



Indikator Kinerja :

**Kelompok Masyarakat yang
mendapatkan Percontohan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
(Kelompok)**

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP					
1	Nama Indikator	:	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)				
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal percontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaa percontohan dan Pedoman SFV.				
3	Formula Perhitungan	:	Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman percontohan				
4	Satuan	:	Kelompok				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Satminkal Penyuluhan KP				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap data Pelaksanaan Percontohan di Satminkal; 2. Laporan Pelaksanaan Percontohan; 3. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan. 				

6

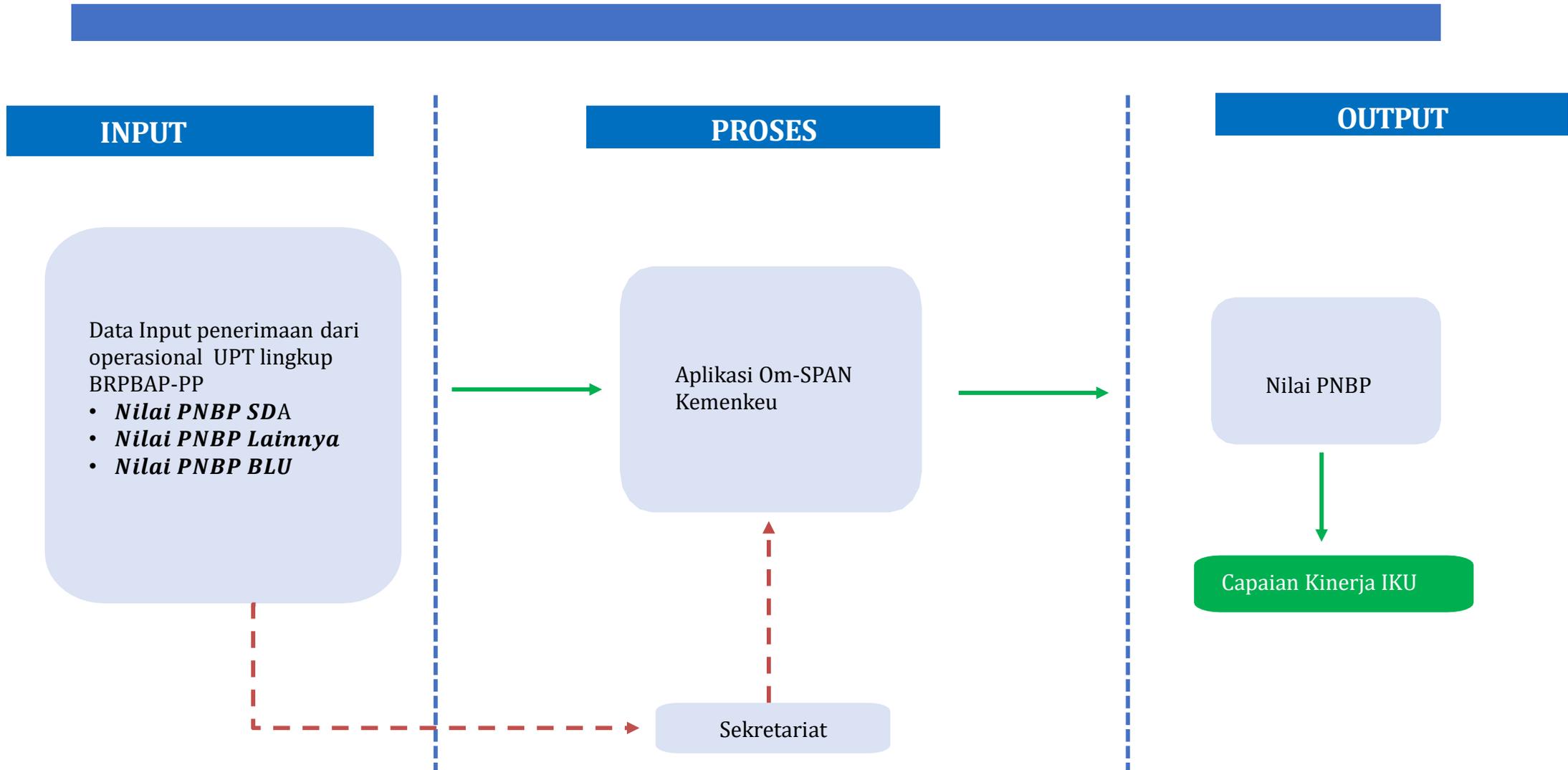


INDIKATOR KINERJA :

Nilai PNBP BRPBAP-PP (Rupiah Miliar)

KODE IK SASARAN		IK UTAMA Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
1	Nama Indikator	:	Nilai PNBP BRPBAP-PP (Rupiah Miliar)				
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. • Dasar hukum : <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah f. PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN g. PMK 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP 				
3	Formula Perhitungan	:	<i>Nilai PNBP Sektor KP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya</i>				
4	Satuan	:	Rupiah Miliar				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	UPT lingkup Pusat Riset Perikanan				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya/surat penyampaian realisasi PNBP dari Kepala Satker ke Pusat				

Nilai PNBP BRPBAP-PP (Rupiah Miliar)



Keterangan :

-  Proses
-  Validasi & Koreksi

7

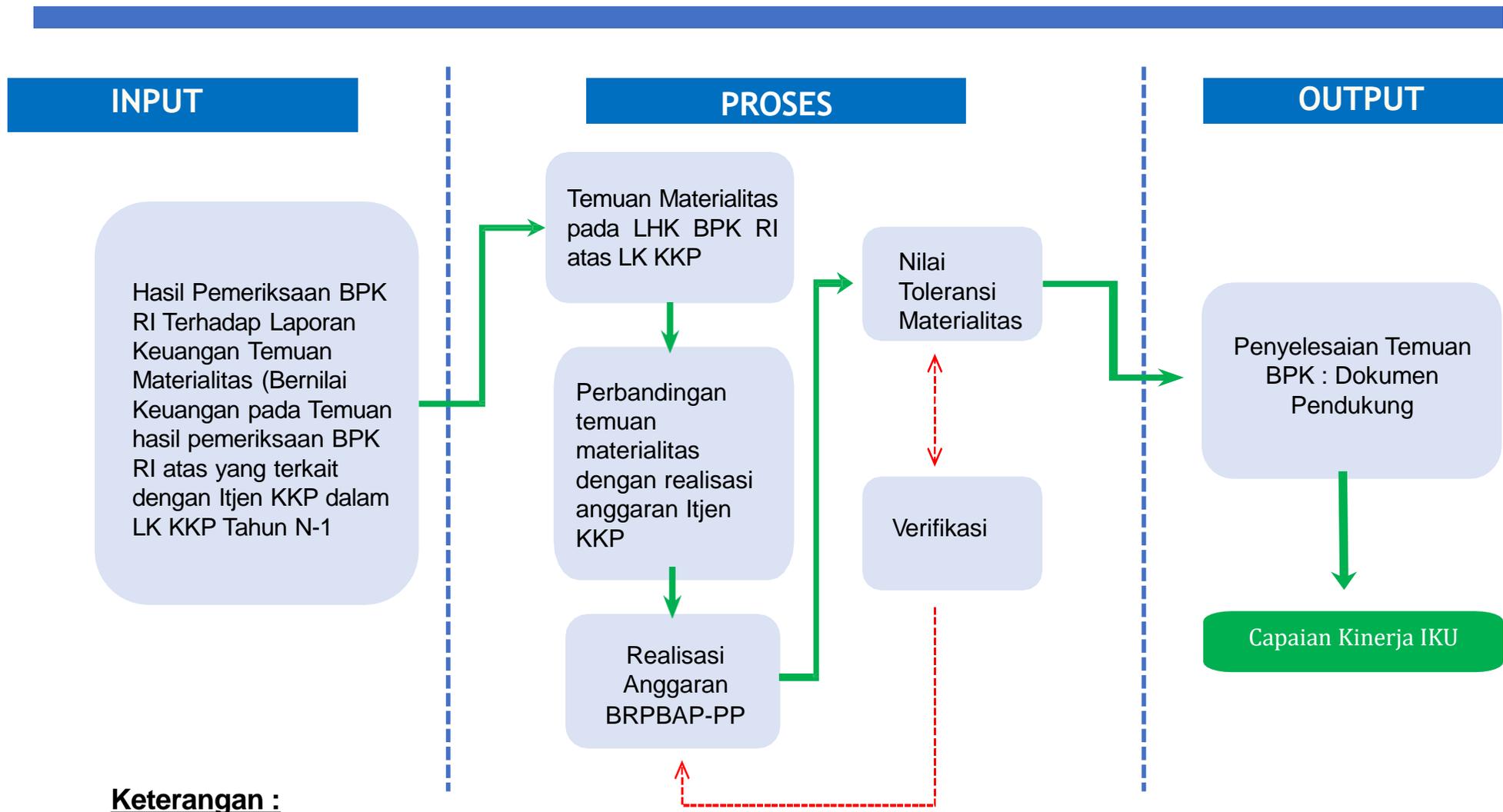


INDIKATOR KINERJA :

**Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK
atas LK BRPBAP-PP dibandingkan Realisasi
Anggaran BRPBAP-PP TA. 2022**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
1	Nama Indikator	:	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBAP-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBAP-PP TA 2022 (%)				
2	Definisi	:	<p>Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK BRPBAP-PP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>UKURAN Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2022 (audited) tidak melebihi ≤0,5% dari total realisasi anggaran Unit Eselon 3 Tahun 2022.</p>				
3	Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon II Tahun 2022}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon II Tahun 2022}} \times 100\%$				
4	Satuan	:	%				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input type="checkbox"/> Maximize	<input checked="" type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Nilai LHP BPK dari BRSDM KP				

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBAP-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPBAP-PP 2022



Keterangan :
 → Proses
 -.-> Validasi & Koreksi

8



INDIKATOR KINERJA :

**Indeks Profesionalitas ASN
BRPBAP-PP (Indeks)**

1	Nama Indikator	:	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAP-PP (Iindeks)
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. • Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). • Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

3	Formula Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin. • Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi (a) Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), (b) Pendidikan S-2 (Strata-Dua), (c) Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat), (d) Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda), (e) Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan (f) Pendidikan di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut:
---	---------------------	---	---

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

3 Formula Perhitungan

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - a. Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - b. Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan (1) Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsiak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; (2) Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40; (3) Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; (4) Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

- c. Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- d. Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPL\text{ev } 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 3}$$

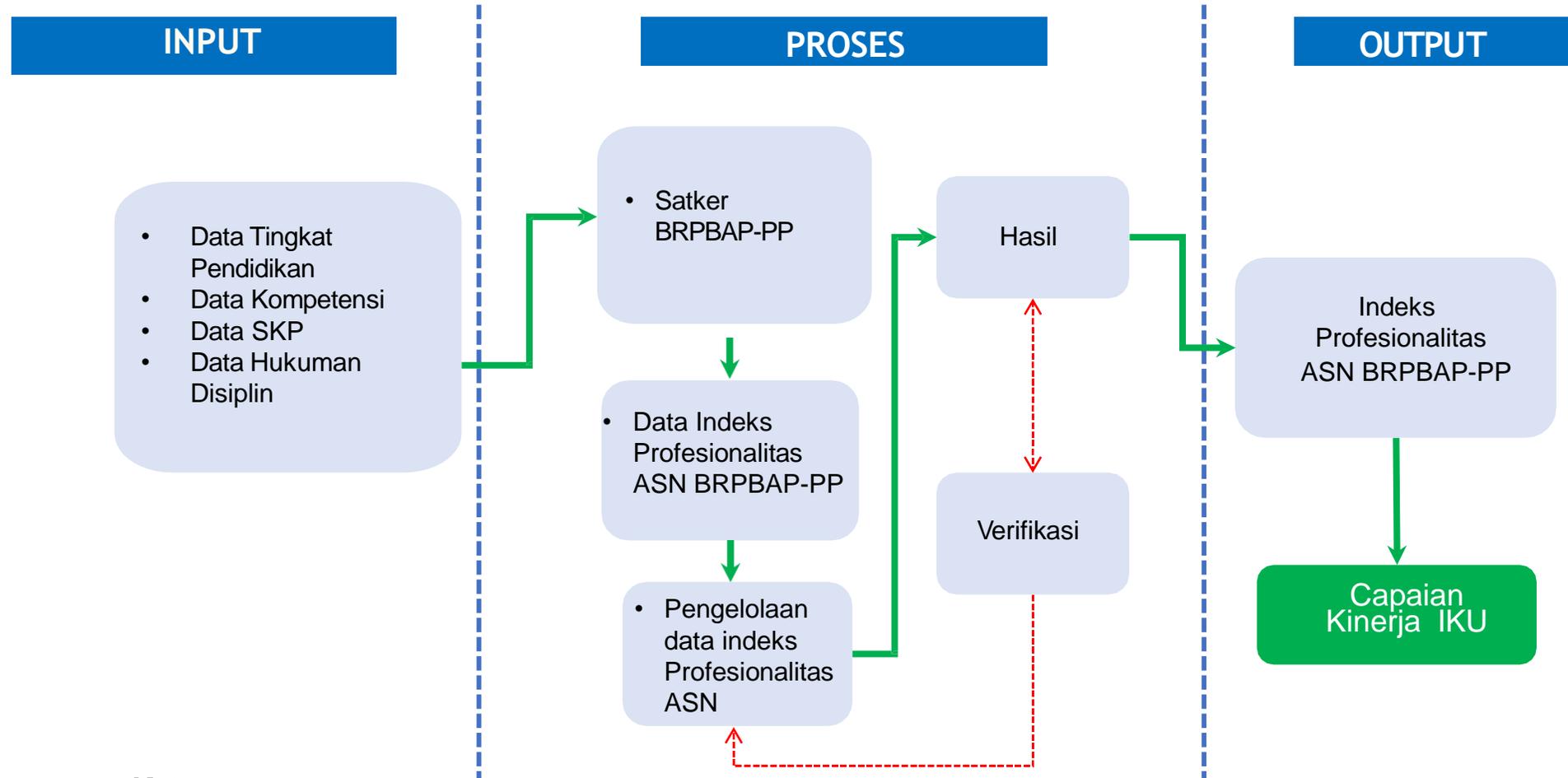
$$IPL\text{ev } 1 = IPASN \text{ Pejabat Lev 1+ Rerata Nilai IPL\text{ev } 3}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 - 90	Cenderung profesional/tinggi
71 - 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 - 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker				
4	Satuan	:	Indeks			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah		<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	BIRO SDMAO			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi		<input type="checkbox"/> Rata-Rata	
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize		<input type="checkbox"/> Minimize	
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan		<input type="checkbox"/> Triwulanan	
					<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	
11	Bukti Dukung	:	Surat Hasil pengukuran IP ASN dari BRSDM KP			

Indeks Profesionalitas ASN BRPBAP-PP (Indeks)



Keterangan :

- Proses
- .-> Validasi & Koreksi

9



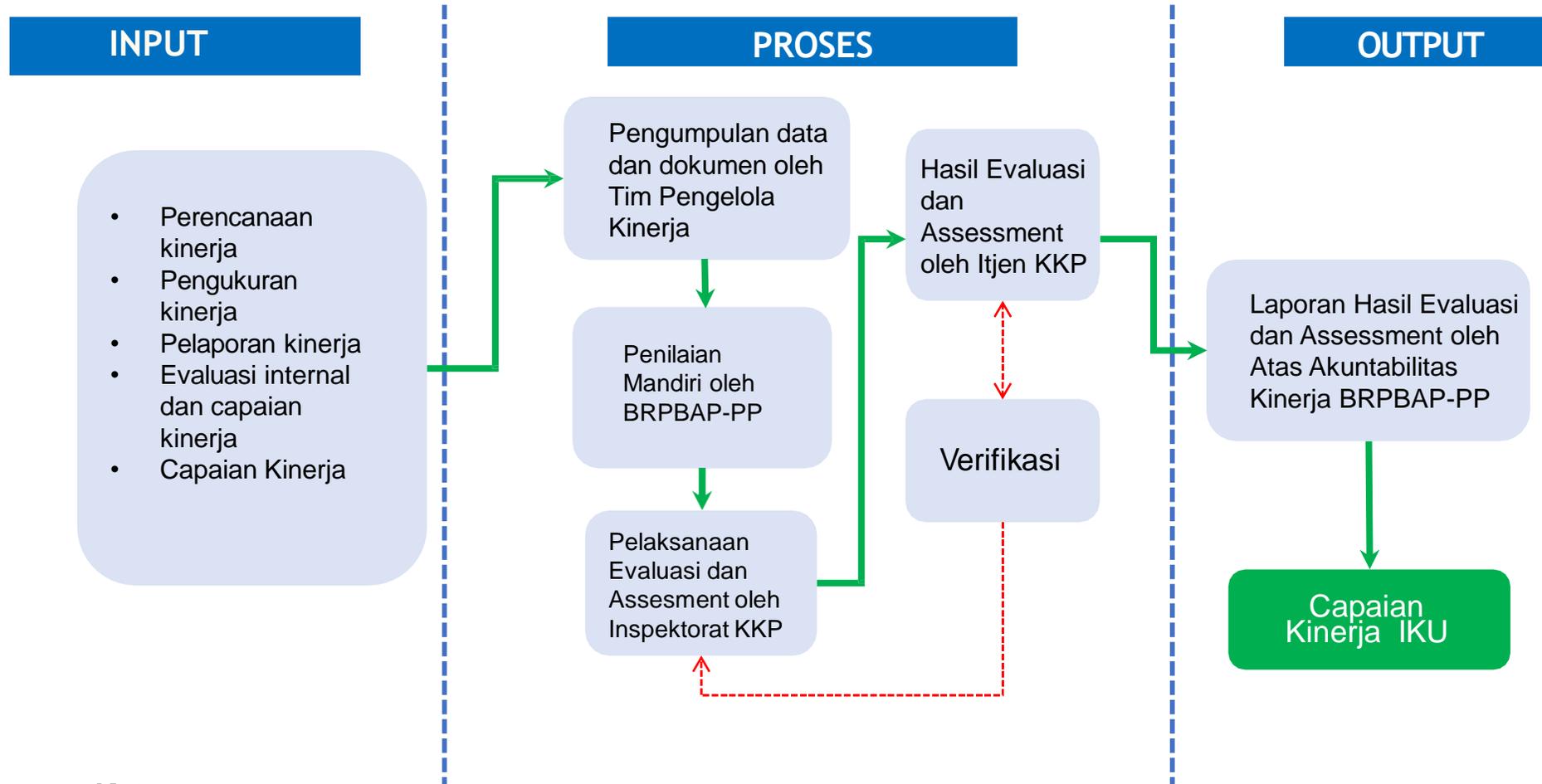
INDIKATOR KINERJA :

Nilai PM SAKIP BRPBAP-PP (Nilai)

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker																												
1	Nama Indikator	:	Nilai PM SAKIP BRPBAP-PP (Nilai)																											
2	Definisi	:	<p>Nilai PM SAKIP Level III BRSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level III merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon III lingkup BRPBAP-PP.</p> <p>Unit Kerja level II lingkup BRSDM terdiri Sekretariat BRSDM, Pusat Rise Kelautan, Pusat Riset Perikanan, Pusat Pendidikan KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, dan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.</p>																											
3	Formula Perhitungan	:	<p>Nilai PM SAKIP Level III lingkup BRSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BRSDM</p> <p>Kategori nilai PM SAKIP Level III lingkup BRSDM yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="545 646 1431 965"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>				Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup (memadai)	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																												
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																												
A	>80 – 90	Memuaskan																												
BB	>70 – 80	Sangat Baik																												
B	>60 – 70	Baik																												
CC	>50-60	Cukup (memadai)																												
C	>30 – 50	Kurang																												
D	0 – 30	Sangat Kurang																												
4	Satuan	:	Nilai																											
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome																									
6	Sumber Data	:	Sekretariat BRSDM																											
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir																									
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru																							

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan	(X) Buat Baru
9	Polarisasi	:	(X) Maximize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran		(X) Tahunan
11	Bukti Dukung	:	(1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen. (2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BRSDM				

Nilai PM SAKIP BRPBAP-PP (Nilai)



Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

10



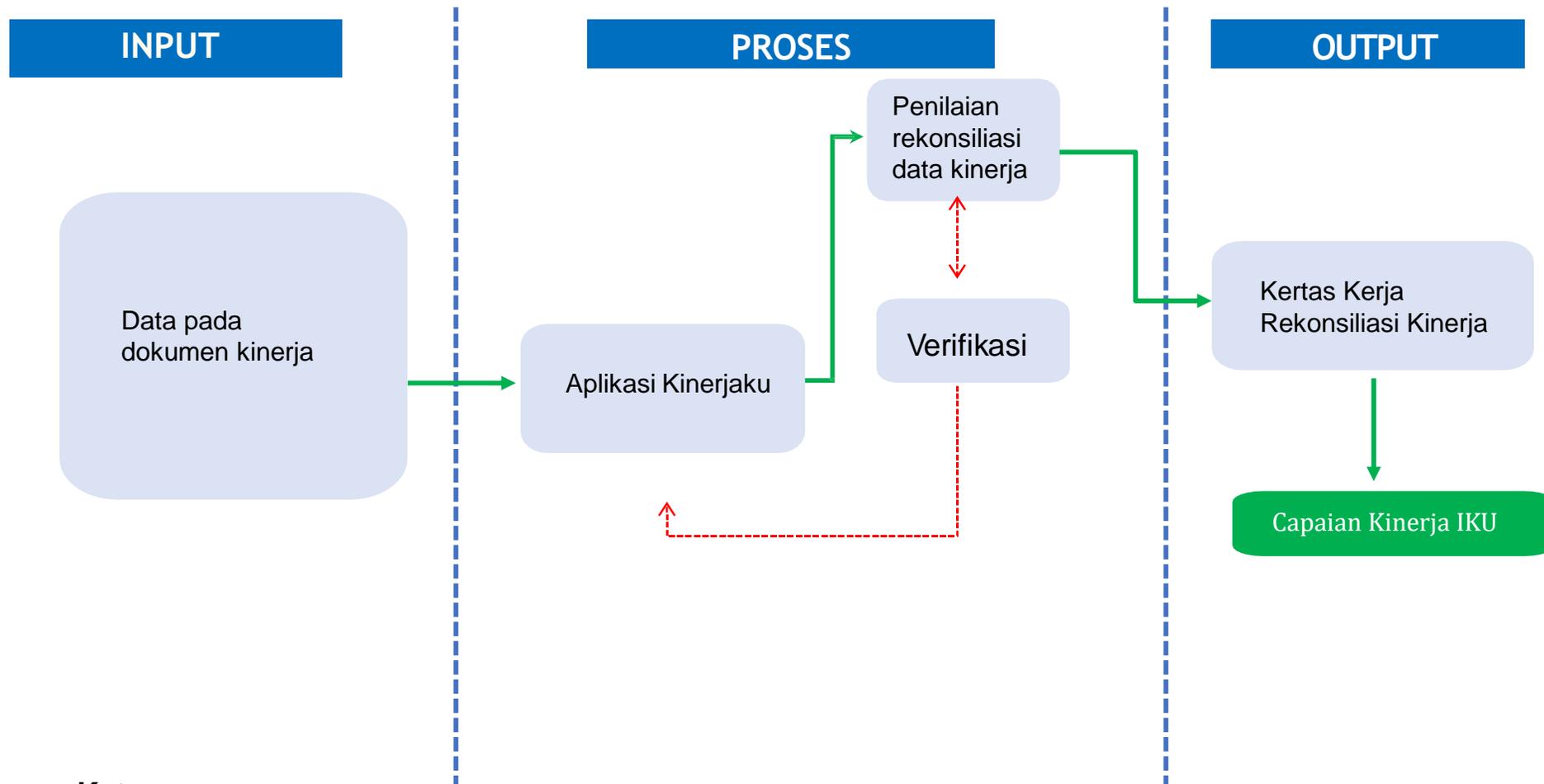
INDIKATOR KINERJA :

**Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBAP-PP
(Nilai)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
1	Nama Indikator	:	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBAP-PP (Nilai)				
2	Definisi	:	<p>(1) Rekonsiliasi kinerja Pusat Riset Perikanan adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Pusat Riset Perikanan</p> <p>(2) Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja Pusat Riset Perikanan, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II Setjen untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik</p>				
3	Formula Perhitungan	:	<p>Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 aspek, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek Kepatuhan (bobot 25%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: (a) Perjanjian Kinerja; (b) Manual Indikator Kinerja; (c) Rincian Target Indikator; (d) Laporan Kinerja; (e) Data Dukung Laporan Kinerja Aspek Kesesuaian (bobot 25%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku: <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian Target Kinerja (Perjanjian Kinerja – Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku) Kesesuaian Realisasi Kinerja (Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku) Kesesuaian pada Sistem Aplikasi (Manual IKU – Rincian Target IKU – Aplikasi kinerjaku) Aspek Ketercapaian (bobot 30%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerjaku Aspek Ketepatan (bobot 20%), diukur dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan Pelaporan dokumen ke aplikasi e-SakipReviu <p>Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (25% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (25% x Nilai Aspek Kesesuaian) + (30% x Nilai Aspek Ketercapaian) + (20% x Nilai Aspek Ketepatan)</p>				
4	Satuan	:	Nilai				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Perencanaan dan Monev				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input type="checkbox"/> Buat Baru

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker				
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
11	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian hasil rekonsiliasi kinerja dari BRSDM KP dan KERTAS KERJA REKONSILIASI KINERJA yang ditandatangani oleh Pembahas dan Kepala BRPBAP-PP			

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBAP-PP (Nilai)



Keterangan :

-  Proses
-  Validasi & Koreksi

1 1



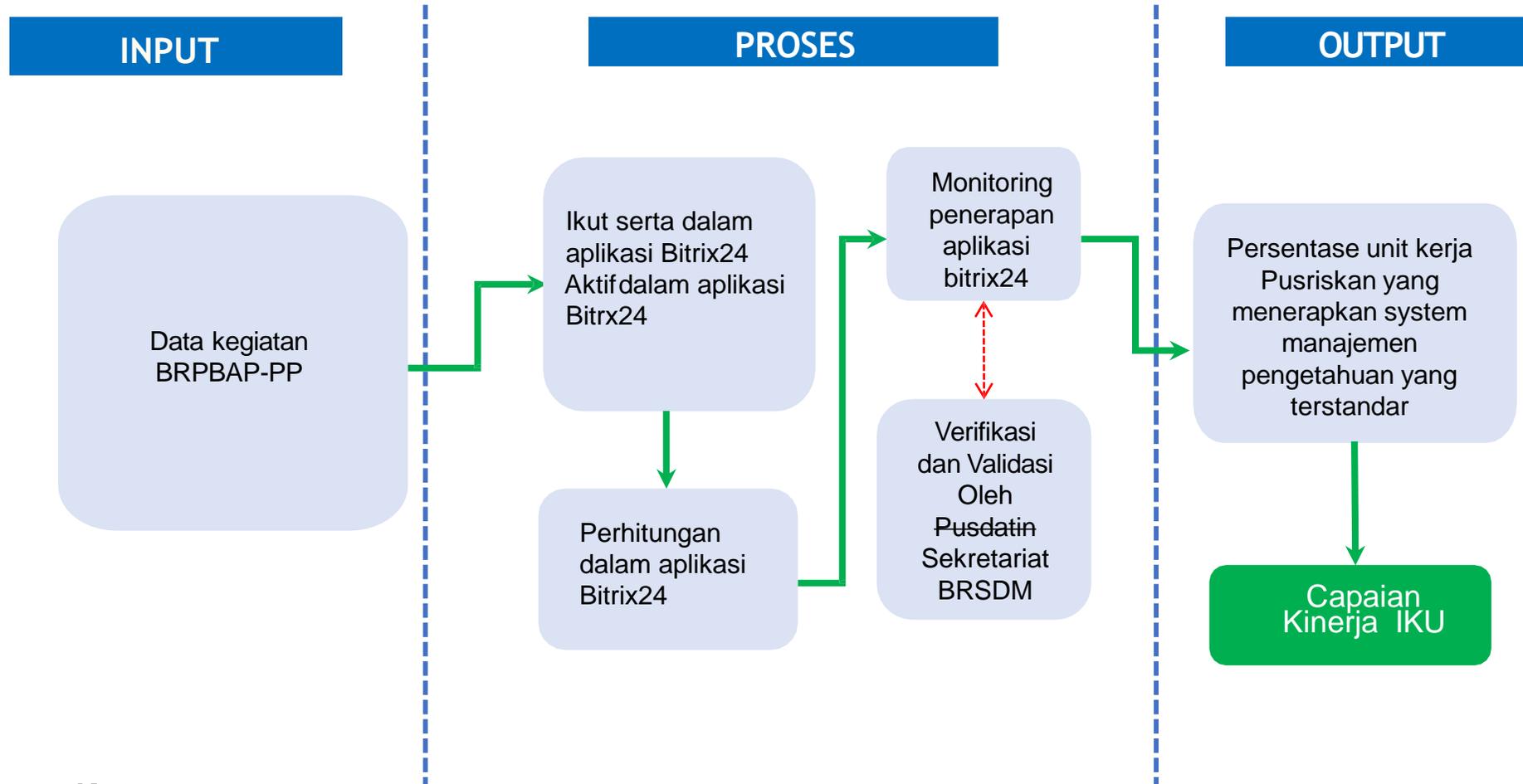
INDIKATOR KINERJA :

**Persentase Unit Kerja yang Menerapkan
Sistem Manajemen Pengetahuan yang
Terstandar BRPBAP-PP (%)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker		
1	Nama Indikator	:	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBAP-PP (%)	
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi <i>Bitrix24</i> 	
3	Formulasi Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi <i>Bitrix24</i> Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5; Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1; Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3. 	Cara Mengukur : a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (<i>bitrix</i>) b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup pejabat fungsional tertentu/personil yang ditunjuk di BRPBAP-PP yang masih aktif Sekretariat BRSDM menyediakan data hasil rekapan pejabat tertentu/personil yang ditunjuk yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon III.
			Capaian dihitung dengan rumus: Pemenuhan Dokumen : $\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%$ Keaktifan : $\frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 80\%$	Nilai MP Unit Lev III $MP_{\text{Unit Level II}} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keaktifan}$ Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
4	Satuan	:	%				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Sekretariat BRSDM				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-Rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	Surat Capaian IKU MP dari BRSDM KP				

Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPBAP-PP (%)



Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

12

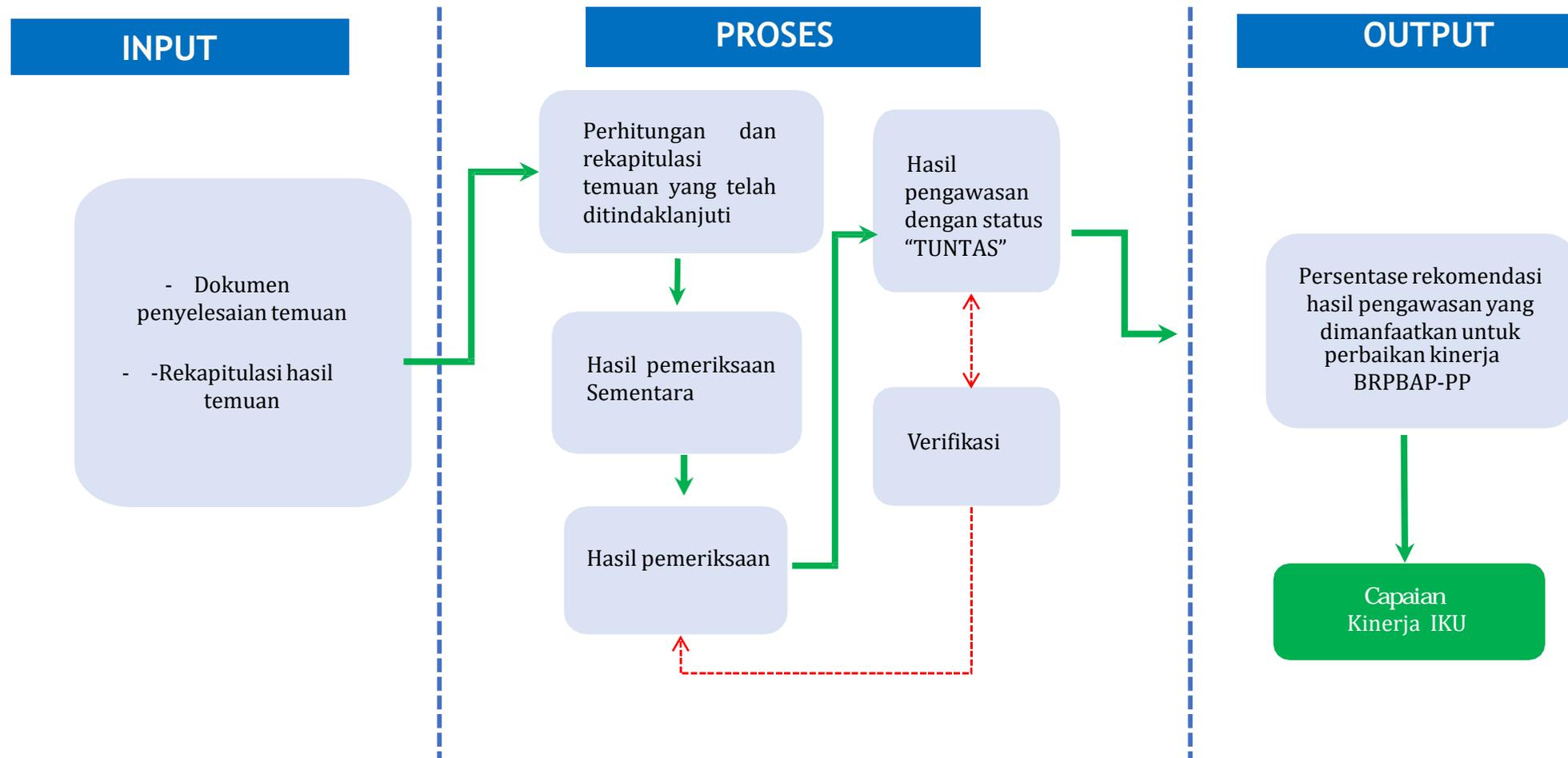


INDIKATOR KINERJA :

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBAP-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
1	Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBAP-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)				
2	Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon III lingkup BRPBAP-PP.				
3	Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon III}} \times 100\%$				
4	Satuan	:	%				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Sekretariat BRSDM				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BRSDM KP				

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBAP-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)



Keterangan :

-  Proses
-  Validasi & Koreksi

13



INDIKATOR KINERJA :

Nilai IKPA BRPBAP-PP (Nilai)

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker
1	Nama Indikator	: Nilai IKPA BRPBAP-PP (Nilai)
2	Definisi	: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; (c) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70
3	Formula Perhitungan	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) <ul style="list-style-type: none"> Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobor Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$ <p>1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik $IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$ <p>2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pematkhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pematkhiran 10 hari kerja bulan Februari Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik <p>Belanja Pegawai : $DevDIPA BPeg = \frac{ R BPeg n - RPD BPeg n }{RPD B Peg n} \times 100$</p> <p>Belanja Barang : $DevDIPA BBar = \frac{ R BBar n - RPD BBar n }{RPD B Bar n} \times 100$</p> <p>Belanja Modal : $DevDIPA BMod = \frac{ R BMod n - RPD BMod n }{RPD B Mod n} \times 100$</p> <p>Seluruh Jenis Belanja : $DevDIPA n = \frac{ Dev DIPA BPeg + DevDIPA BBar + Dev DIPA BMod }{3}$</p>

3. Penyerapan Anggaran- Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual - Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 - 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan - Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM LS TW}{SPM LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- %GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran TUP}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- Rasio Dispensasi (permil) $RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA

- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

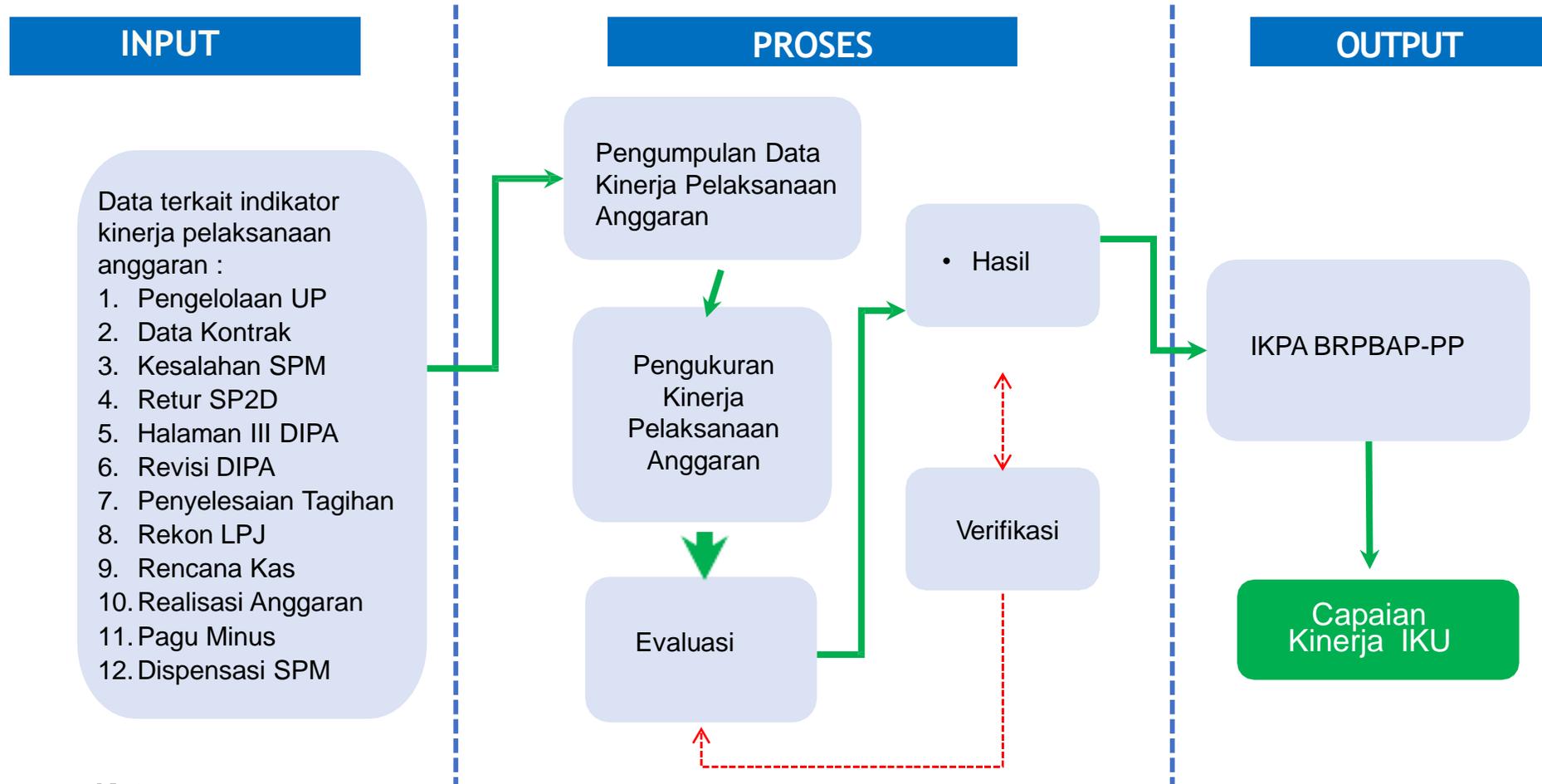
$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \times n$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
4	Satuan	:	Nilai				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	Surat Capaian Nilai IKU IKPA dari Biro Keuangan				

Nilai IKPA BRPBAP-PP (Nilai)



Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

14



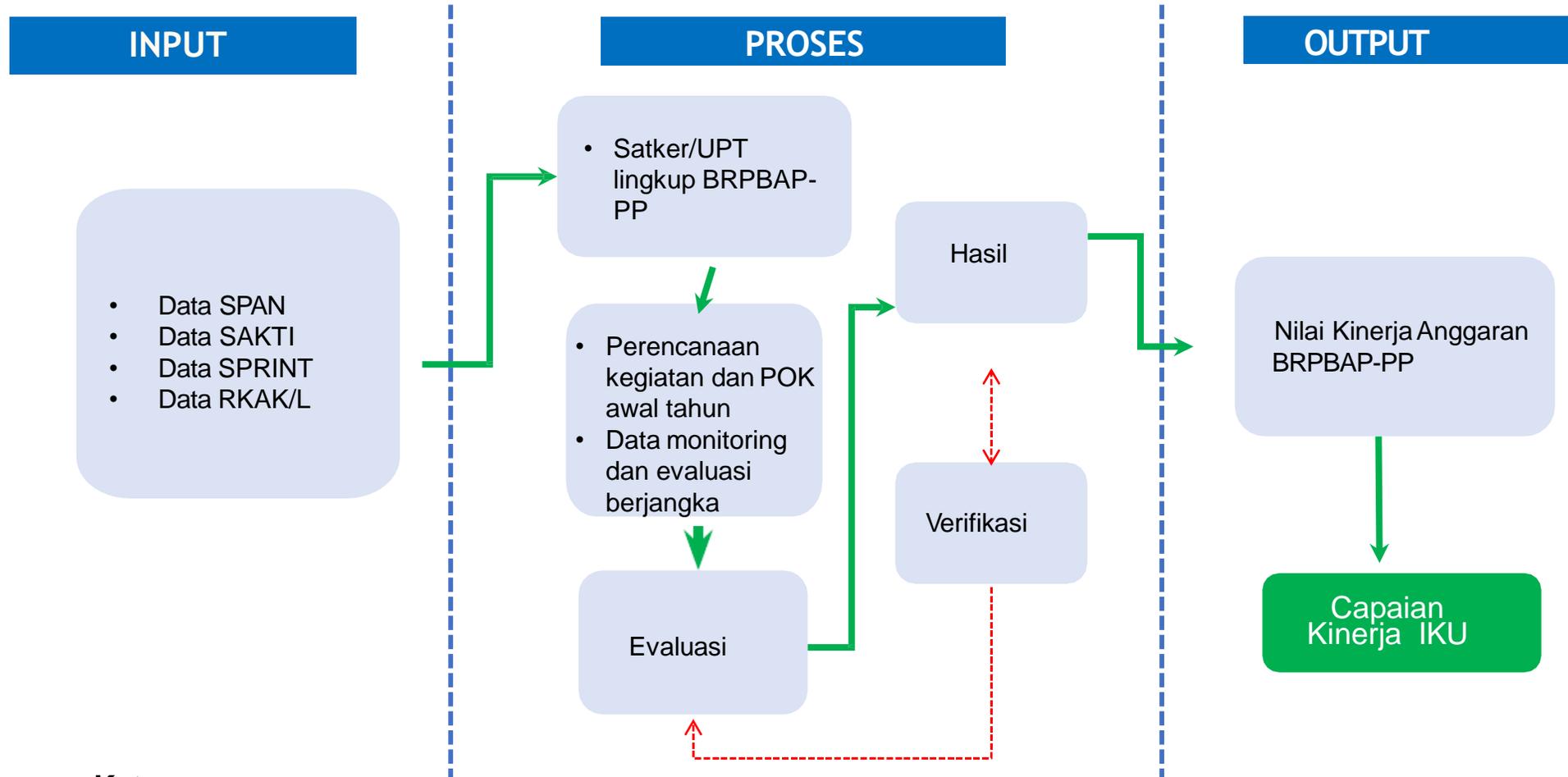
INDIKATOR KINERJA :

Nilai Kinerja Anggaran BRPBAP-PP (Nilai)

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker		
1	Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Anggaran BRPBAP-PP (Nilai)	
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. • Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya • Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga • Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah • Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : (a) Sangat Baik, apabila NKA > 90; (b) Baik, apabila NKA >80 - 90; (c) Cukup, apabila NKA >60 - 80; (d) Kurang, apabila NKA >50 - 60; (e) Sangat Kurang, apabila ≤ 50 	
3	Formula Perhitungan	:	<p>Formula Aspek Implementasi</p> $NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$ <p>Keterangan :</p> <p>NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi</p> <p>P : penyerapan anggaran</p> <p>K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>COP : capaian output program</p> <p>CRO : capaian ro</p> <p>NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja</p> <p>W_p : bobot penyerapan anggaran</p> <p>W_k : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>W_{COP} : bobot capaian Output Program</p> <p>W_{CRO} : bobot capaian RO</p>	<p>Formulasi Aspek Manfaat</p> $NKA \text{ K/L} = \frac{CSS + \text{rata - rata nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I}}{2}$ <p>Keterangan :</p> <p>NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/ lembaga</p> <p>CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementerian/ lembaga atas aspek manfaat</p> <p>W_E : bobot efisiensi</p> <p>Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :</p> <p>$W_p = 9,7\%$</p> <p>$W_k = 18,2\%$</p> <p>$W_{COP} = W_{CRO} = 43,5 \%$</p> <p>$W_E = 28,6\%$</p>
4	Satuan	:	Nilai	
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah () Outcome

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan (Aplikasi SMART DJA KEMENKEU)				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	(X) Tidak diturunkan <input type="checkbox"/> Buat Baru	
9	Polarisasi	:	(X) Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	(X) Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	Nota Dinas dari Biro Keuangan / Capture Aplikasi SMART DJA KEMENKEU				

Nilai Kinerja Anggaran BRPBAP-PP (Nilai)



Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

15

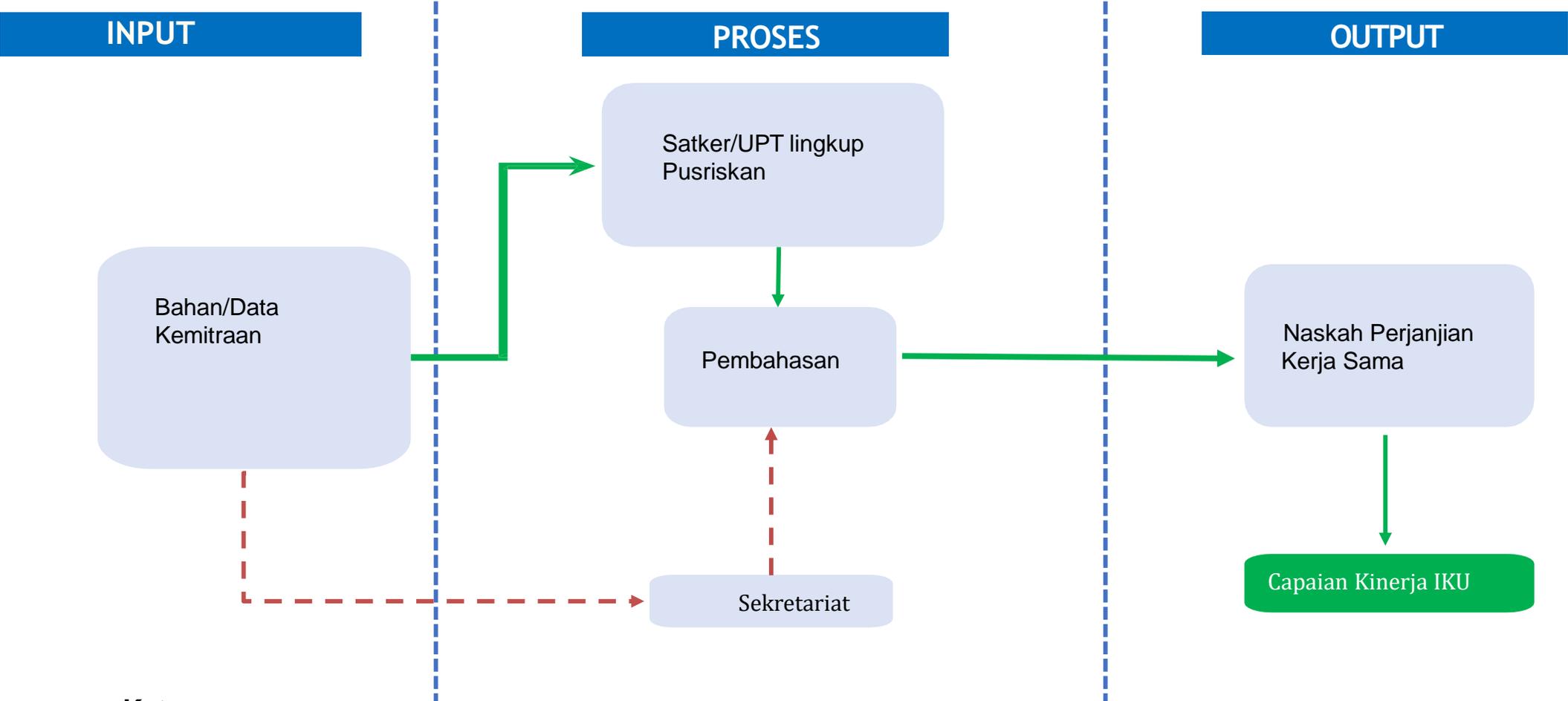


INDIKATOR KINERJA :

Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPBAP-PP (Kemitraan)

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
1	Nama Indikator	:	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBAP-PP (Kemitraan)				
2	Definisi	:	<p>Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja lingkup BRPBAP-PP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPNP yang berlaku pada KKP</p> <p>b. PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN</p> <p>c. Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian</p>				
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan				
4	Satuan	:	Kemitraan				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Satker lingkup Pusat Riset Perikanan				
7	Pola Perhitungan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	<ol style="list-style-type: none"> Naskah Perjanjian Kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya: Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll Laporan Kegiatan Kemitraan 				

Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPBAP-PP (Kemitraan)



Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

16



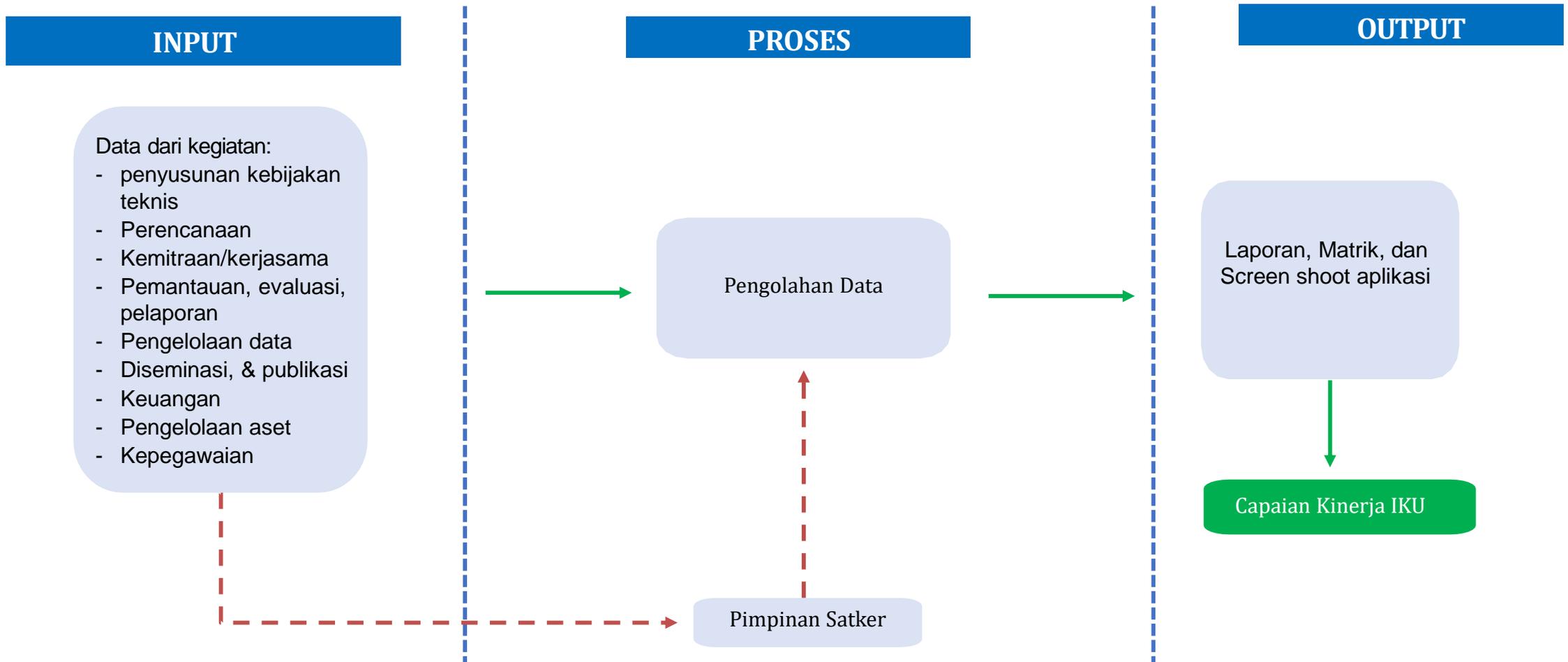
INDIKATOR KINERJA :

Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBAP-PP (%)

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
1	Nama Indikator	:	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBAP-PP (%)		
2	Definisi	:	<p>Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPBAP-PP berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.</p> <p>Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.</p>		
3	Formula Perhitungan	:	<p>A. Jumlah target dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang dilaksanakan pada tahun berjalan.</p> <p>B. Jumlah realisasi dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya pada tahun berjalan.</p> <p>C. Dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.</p> <p style="text-align: center;"><i>Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya =</i> $\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen}}{\text{jumlah target dokumen}} \times 100\%$</p> <p>Persentase dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang tersedia / dibandingkan total dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang ditargetkan</p>		
4	Satuan	:	%		
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	BRPBAP-PP (Tata Usaha, Program dan Anggaran, Tata Laksana dan Data, Monev dan Pelaporan, Kerja Sama dan Diseminasi)		
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	(X) Tidak diturunkan	<input type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	(X) Maximize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	(X) Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang tersedia dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi				

Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBAP-PP (%)



Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

17



Indikator Kinerja :

**Persentase Layanan Dukungan
Manajemen Internal Penyuluhan KP
BRPBAP-PP (%)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker				
1	Nama Indikator	:	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Penyuluhan KP BRPBAP-PP (%)			
2	Definisi	:	Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran			
3	Formula Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. ✓ B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. ✓ Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. $\text{Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal} = \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	Dokumen			
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Puslatluh KP			
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru <input checked="" type="checkbox"/> Tidak diturunkan
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
11	Bukti Dukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker 2. Dokumen Layanan Manajemen di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebanyak 49 Dokumen, terdiri dari: Laporan Rapat Konsolidasi Puslatluh KP (2 Dokumen), Laporan Penyusunan Renja Puslatluh (3 dokumen), Laporan Rumusan Pelatihan dan Penyuluhan KP (4 dokumen), Laporan Realisasi Anggaran (12 dokumen), Laporan SPIP (4 dokumen), Laporan PIPK (1 dokumen), Laporan BMN (1 dokumen), Laporan Bulanan (12 dokumen), Laporan Tahunan (1 Dokumen), Laporan Program dan Kegiatan (1 Dokumen), Laporan evaluasi dudi (1 Dokumen), Laporan evaluasi unit percontohan (1 Dokumen), Laporan Simlat (4 Dokumen), Laporan Evaluasi Simlat (1 Dokumen), Laporan Evaluasi Desa Inovasi (1 Dokumen) 			

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Penyuluhan KP BRPBAP-PP (%)

